

# BAB I

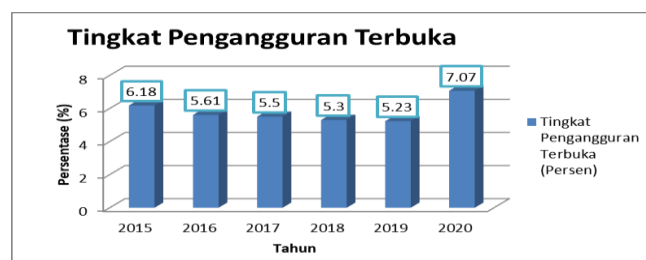
## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi hingga sampai saat ini merupakan topik hangat yang menjadi perhatian utama terkhusus dikalangan pemerintah, dalam hal ini pembangunan ekonomi dapat membantu mendorong perekonomian suatu negara. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas masyarakatnya yang tinggi, sebab tinggi rendahnya produktivitas individu akan berbanding lurus terhadap total produksi yang diciptakan suatu negara, akan tetapi pada realitanya sampai saat ini masih banyak penduduk usia kerja di Indonesia yang belum produktif sebab adanya hambatan dalam memperoleh pekerjaan. Jumlah pekerja yang lebih melimpah dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dapat menjadi akar permasalahan dari pengangguran (Sembiring & Sasongko, 2019).

Pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang sering dirasakan setiap negara maju maupun berkembang dalam hal ini contohnya adalah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan ini ialah dapat mengganggu stabilitas perekonomian serta dapat menurunkan standar kehidupan seorang individu. Dalam teorinya Keynes mengatakan permasalahan pengangguran terjadi karena banyaknya tenaga kerja yang ditawarkan sehingga menyebabkan terjadinya kekauan ditingkat upah. Upah yang mengalami penurunan maka dapat mengurangi jumlah pengangguran karena akan terjadinya peningkatan kesempatan dalam permintaan tenaga kerja (Priyono & Ismail, 2016).

**Grafik 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Dari grafik 1 bahwa selama perjalanannya di enam tahun masalah pengangguran di Indonesia mengalami penurunan yang terjadi ditahun 2015 – 2019. Namun, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada 2020 terjadi peningkatan yang sangat drastis. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 kondisi perekonomian Indonesia sedang terdampak dari masalah covid-19 sehingga dapat berimbas pula pada segala sektor mulai dari sektor Perekonomian, Kesehatan, Pendidikan bahkan sampai pada kondisi ketenagakerjaan.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia terdapat permasalahan pengangguran, dalam hal ini permasalahan pengangguran terjadi di beberapa provinsi yang terdapat di Pulau Jawa, pulau yang berperan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian negara serta pusat kawasan industri yang seharusnya mampu menyerap tenaga kerja lebih, namun kenyataannya masalah pengangguran di Indonesia sampai sekarang masih didominasi oleh provinsi yang terdapat di Pulau Jawa. Berikut tabel yang memperlihatkan persentase masalah pengangguran di 6 provinsi Pulau Jawa :

**Tabel 1 Tingkat Pengangguran Terbuka**

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa</b>						
<b>Provinsi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>DKI Jakarta</b>	7.23	6.12	7.14	6.24	6.22	10.95
<b>Jawa Barat</b>	8.72	8.89	8.22	8.23	8.04	10.46
<b>Jawa Timur</b>	4.47	4.21	4	3.99	3.92	5.84
<b>Jawa Tengah</b>	4.99	4.57	4.47	4.47	4.44	6.48
<b>D.I Yogyakarta</b>	4.07	5.61	3.02	3.35	3.14	4.57
<b>Banten</b>	9.55	8.92	9.28	8.47	8.11	10.64

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS),2021*

Pada tabel tersebut memperlihatkan kalau mulai dari tahun 2015-2020 tingkat pengangguran terbuka di Pulau Jawa secara keseluruhan mengalami kondisi yang fluktuatif. Dalam hal ini Provinsi Jawa Barat termasuk salah satu penyumbang masalah pengangguran tertinggi di Pulau Jawa. Terlihat di lima tahun terakhir Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua setelah Provinsi Banten dan berada pada posisi ketiga pada tahun 2020 setelah Provinsi DKI

Hafiz Maulana, 2022

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jakarta dan Banten dengan masalah pengangguran tertinggi. Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam prekonomian yang maju, akan tetapi jika dilihat pada permasalahan penganggurannya, memiliki persentase jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga menyebabkan tingginya persaingan antara calon pencari kerja, kualitas sumber daya manusia yang jauh dari standar serta berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyaknya penduduk bekerja yang tidak terserap secara maksimal.

Berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan ini disebabkan adanya peningkatan pada kondisi upah minimum, yang menyebabkan banyaknya perusahaan juga industri yang memilih untuk pindah ke provinsi lain dengan tingkat upah minimum kabupaten/kota yang lebih rendah. Selain itu, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum merata di beberapa wilayah yang belum berkembang juga terdapat wilayah yang jauh dari jangkauan sehingga jauh dari lapangan pekerjaan yang tersedia akibatnya dapat mempersulit calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Penyebab lain dari tingginya pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ialah persaingan pada pasar tenaga kerja secara global yang menjadikan perusahaan mengambil kebijakan untuk memperbanyak jumlah tenaga kerja daerah asal dibandingkan dengan pekerja di daerah asli. (Wardhana, Kharisma, & Lathifah, 2021)

Selain itu, pada tahun 2020 Jawa Barat ini merupakan provinsi yang memiliki Lembaga Kursus dan Pelatihan swasta terakreditasi paling banyak yaitu mencapai 365 lembaga atau sekitar 22,50 persen diantara 34 provinsi yang terdapat di Indonesia (Ketenagakerjaan, 2020). Seharusnya dengan banyaknya jumlah LKP dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, sehingga berdampak terhadap kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, banyaknya LKP ini belum mampu memberikan pengaruh dalam menurunkan masalah pengangguran, sehingga fenomena seperti inilah yang mendasari peneliti untuk memilih Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian.

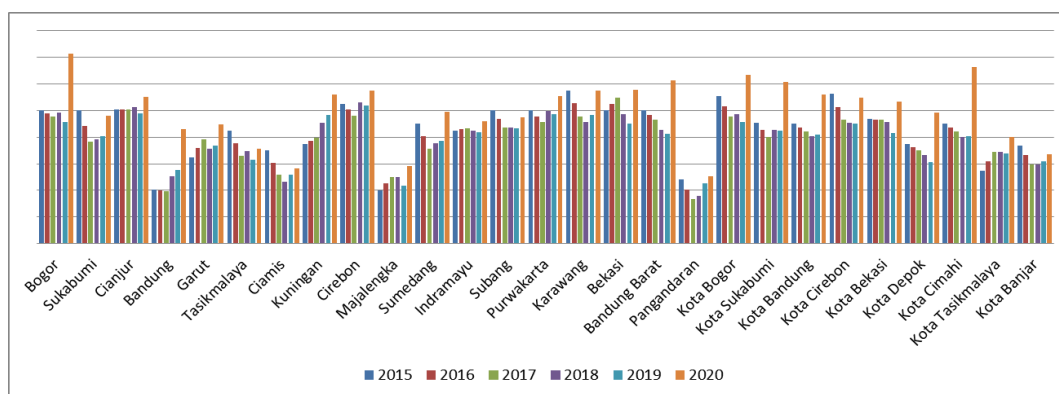
**Hafiz Maulana, 2022**

***PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Walaupun demikian, tingginya masalah pengangguran ini dapat ditekan oleh kontribusi pada indikator PDRB dalam kategori lapangan usaha. Dari tujuh belas sektor PDRB terdapat tiga sektor dengan kontribusi tertinggi dari tahun 2015-2020 diantaranya, Industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran juga pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (BPS, 2021). Hal ini mengindikasikan kalau telah terjadi kenaikan terhadap nilai *output*. Semakin besarnya *output* yang dihasilkan akan berdampak terhadap peningkatan faktor produksi dalam hal ini adalah permintaan tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan masalah pengangguran. Terdiri dari 27 Kab/Kota setiap daerah memiliki presentase tingkat pengangguran terbuka yang berbeda. Seperti terlihat pada grafik 2 sebagai berikut:

**Grafik 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS),2021

Pada grafik 2 diketahui kalau TPT pada 27 Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kondisi fluktuatif, adapun Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dan yang terendah terdapat di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan luas wilayah pada kabupaten pangandaran ini relatif lebih kecil.

Faktor yang menjadi penyebab tingginya masalah pengangguran adalah meningkatnya jumlah penduduk, jumlah penduduk yang selalu meningkat maka akan berdampak terhadap melimpahnya pula pada total penduduk angkatan kerja. Setiap meningkatnya total penduduk angkatan kerja yang belum memiliki

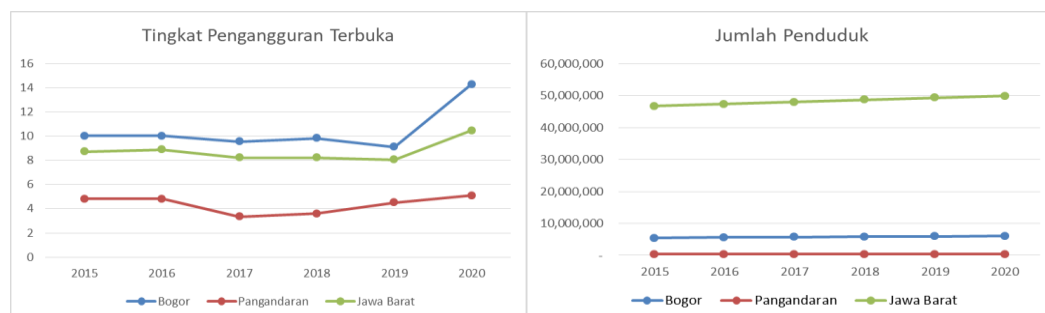
Hafiz Maulana, 2022

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja, maka akan berakibat pula dengan kondisi meningkatnya pengangguran. (Trianggono & Siti, 2017).

### Grafik 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penduduk



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015-2020

Pada grafik 3 memperlihatkan kalau jumlah penduduk di masing-masing wilayah terus bertambah, akan tetapi bertambahnya penduduk ini tidak selalu memberikan dampak terhadap meningkatnya tingkat pengangguran terbuka, hal ini dapat dibuktikan di Kabupaten (Bogor dan Pangandaran) pada tahun 2017, ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 2,28% akan tetapi tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 9,55%, Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran mencapai 0,58% namun peningkatan ini tidak diikuti dengan meningkatnya TPT.

Fenomena tersebut disebabkan oleh, terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja, dimana tahun 2017 total penduduk bekerja untuk kabupaten bogor ini mencapai 2,351,753 jiwa dari total angkatan kerja sebanyak 2,600,121 jiwa. Sedangkan untuk Kabupaten Pangandaran sendiri jumlah penduduk bekerja pada tahun 2017 mencapai 235,561 jiwa dari total angkatan kerja sebanyak 243,702 jiwa. Selain itu menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten (Bogor dan Pangandaran) ditahun 2017 ini disebabkan krarena adanya peningkatan pada indikator PDRB dalam kategori lapangan usaha. Dengan terjadinya peningkatan pada indikator PDRB lapangan usaha menandakan bahwa adanya peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja, sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Perkembangan pembangunan manusia mampu dinilai melalui besarnya Indeks Pembangunan Manusia, mutu modal manusia suatu daerah dapat dinilai

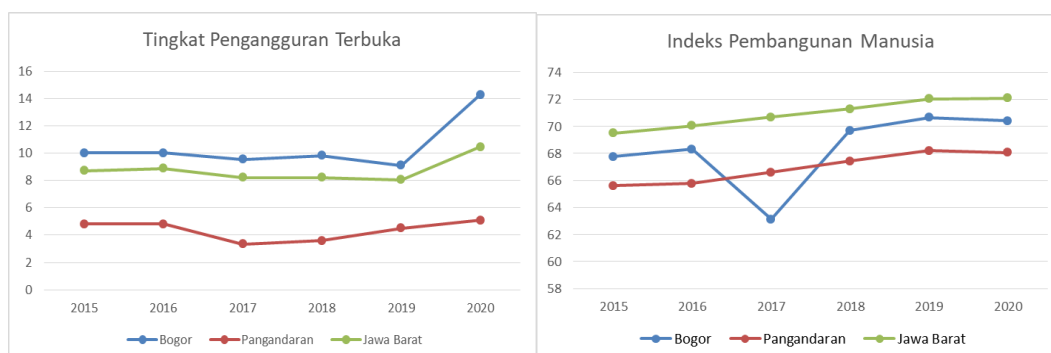
Hafiz Maulana, 2022

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

melalui kualitas pada bidang pendidikan juga kesehatan (Anwar, 2017). Todaro mengatakan korelasi IPM dan pengangguran yaitu, pembangunan manusia berperan untuk membangun kesanggupan negara dalam menyerap teknologi yang canggih demi meningkatkan kemampuannya dalam melahirkan lapangan pekerjaan, menurunkan pengangguran, yang pada gilirannya dapat menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

**Grafik 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Grafik 4 menunjukkan kalau IPM antardaerah cenderung mengalami peningkatan. Namun, IPM yang meningkat tidak selalu memberikan dampak terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka seperti yang terjadi ditahun 2018, ketika indeks pembangunan manusia Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, namun TPT ikut mengalami peningkatan mencapai 9.83%. Peningkatan IPM juga terjadi pada Kabupaten Pangandaran ketika IPM mengalami peningkatan, disatu sisi TPT mengalami peningkatan dalam hal ini sebesar 0.25% dari tahun sebelumnya.

Fenomena meningkatnya pengangguran di Kabupaten Bogor ini disebabkan karena terjadinya penurunan penduduk yang bekerja pada tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah dari 40,73% menjadi 36.09% di tahun 2018 juga pada tingkat perguruan tinggi penduduk yang bekerja mengalami penurunan, dari 8.94% ditahun 2017 menjadi 7.93% ditahun 2018 (BPS, 2018). Sedangkan meningkatnya TPT di Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh, pertumbuhan angkatan kerja belum diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja yang memadai,

Hafiz Maulana, 2022

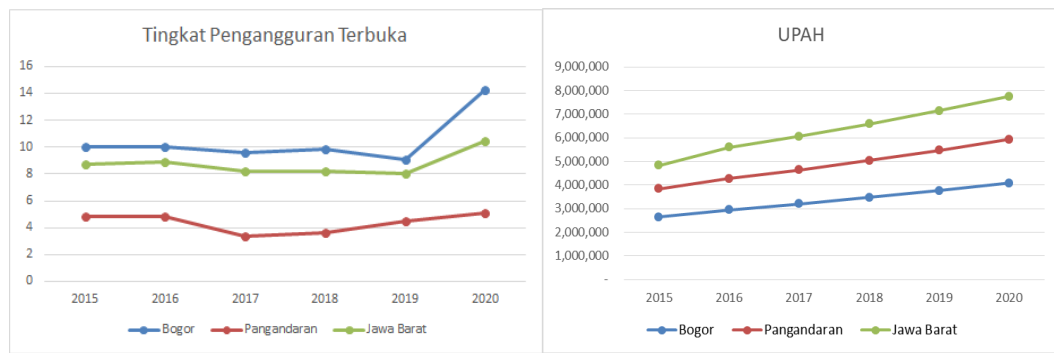
**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

akibatnya tingkat penyerapan tenaga kerja terhadap penduduk bekerja sedikit. (BPS, 2020).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi TPT ialah upah yang berlaku. Kenaikan tingkah upah akan sejalan dengan menurunnya jumlah pekerja yang diperlukan. Hal tersebut diperkuat oleh teori keynes yang mengatakan kalau peningkatan dalam kesempatan kerja hanya dapat terjadi apabila kondisi upah mengalami penurunan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran (Prawira, 2018)

**Grafik 5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019

Grafik 5 memperlihatkan kalau perkembangan upah minimum di Kabupaten (Bogor dan Pangandaran) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2020. Meningkatnya upah ini seharusnya dapat berdampak juga terhadap meningkatnya tingkat pengangguran. Namun, tingginya upah ini tidak selalu diikuti dengan meningkatnya TPT seperti yang terjadi pada tahun 2017 dan 2019 ketika upah minimum kabupaten bogor mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,204,551 juta rupiah justru TPT menurun mencapai 9.55% dan ditahun 2019 saat upah minimum kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,763,406 juta rupiah namun tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya mencapai 9.11%.

Fenomena meningkatnya upah ini disebabkan adanya peningkatan pada biaya kebutuhan hidup akibat terjadinya peningkatan pula pada tarif kebutuhan ekonomi, juga terjadinya peningkatan pada kelompok pengeluaran kesehatan,

Hafiz Maulana, 2022

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perumahan, bahan bakar atau gas, listrik, air, bahan makanan, juga pada pengeluaran pendidikan, rekreasi dan olahraga. Kondisi meningkatnya upah ini akan menjadi daya tarik bagi calon pencari kerja, sehingga dapat memperbesar tantangan yang dihadapi oleh para calon pekerja dalam mendapatkan pekerjaan.

Beberapa penelitian mencoba melihat pengaruh jumlah penduduk, ipm, umk terhadap tingkat pengangguran terbuka. Para peneliti tersebut diantaranya, Trianggono Budi Hartanto dan Siti Umajah Masjkuri (2017), Aisyah Sisnita dan Nano Prawoto (2017), Dwi Mahroji (2019), Wildan Aziz Amrullah, dkk (2019), Valentine Brahma Putri Sembiring dan Gatot Sasongko (2019) menyatakan kalau variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka.

Dari uraian latar belakang di atas Provinsi Jawa Barat memiliki keunikan tersendiri karena dengan jumlah penduduk, ipm, serta umk yang selalu meningkat seharusnya dapat memberikan dampak terhadap tingkat pengangguran terbuka, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih *detail* masih terdapat gap atau fenomena yang tidak sesuai dengan teori. Atas dasar tersebut maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat tema tersebut dan memilih 27 Kab/Kota dengan memilih judul penelitian yaitu **“Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat”**.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Selama tahun 2015-2020 Provinsi Jawa Barat masih menjadi wilayah penyumbang TPT tertinggi di Pulau Jawa. Dalam kaitannya dengan permasalahan pengangguran, terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap TPT diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk tetapi tidak diikuti dengan modal manusia yang berkualitas, kualitas modal manusia dalam hal ini mampu dinilai melalui indeks pembangunan manusia, serta upah minimum yang juga dapat berpengaruh pada TPT. Sebab peningkatan pada upah menyebabkan tingkat permintaan tenaga kerja yang diminta perusahaan disetiap tahunnya akan mengalami penurunan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada permasalahan

Hafiz Maulana, 2022

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, IPM DAN UMK TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan  
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]



pengangguran. Berdasarkan uraian tersebut didapatkan rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ?

### **I.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka.

### **I.4 Manfaat Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat yang dapat dilihat dari 2 aspek :

1. Aspek Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan terkait faktor yang dapat mempengaruhi TPT Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat, dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melaksanakan penelitian berikutnya, juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengembangkan pengetahuan pembelajaran teori di perkuliahan.

2. Aspek Praktik
  - a. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan yang tepat dalam mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dengan melihat faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya TPT. Sehingga permasalahan pengangguran tersebut dapat segera teratasi dengan baik.

- b. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran serta kesempatan dalam menganalisis korelasi dari Jumlah Penduduk, IPM dan UMK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat, yang pada akhirnya penulis memiliki kesempatan untuk mempergunakan teori yang diterima dibangku perkuliahan.